

# **BUDAYA POLITIK WARGA**

## **(Studi Tentang Konflik Pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Desa Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah)**

Krisnaldo Triguswinri  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang  
krisnaldo.triguswinri@gmail.com

### **Abstrak**

Penulis bertujuan menelusuri perubahan pola pemikiran warga Tegaldowo yang sedang berkonflik. Mengetahui bagaimana kondisi tersebut mampu mempengaruhi kesadaran warga menjadi politis atas lingkungan hidup. Kesadaran tersebut tentunya disebabkan atas timbulnya masalah ekologi sosial yang secara langsung bersentuhan dengan warga, dan kemudian mengakibatkan transformasi tipe budaya politik warga parokial menjadi partisipan. Selain itu, warga konflik cenderung menjadi militan atas keresahan dan keterancaman yang sedang mereka hadapi. Kecenderungan tersebut dibuktikan dengan beragam aktifitas politik akar rumput yang mereka lakukan untuk tetap mempertahankan ruang hidupnya, seperti: (1) rapat-rapat kecil terkait siasat penolakan (manajemen organisasi dan manajemen konflik hingga kajian strategis), (2) mempelajari taktik pengorganisasian massa untuk penyelesaian konflik, (3) membangun relasi solidaritas antar elemen, (4) memahami undang-undang atau peraturan terkait konflik, (5) sampai pada mempelajari hirarki penuntutan dan mekanisme prosedural kelembagaan.

*Kata kunci: perubahan kesadaran politik, konflik sosial, Kendeng*

### **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia konflik agraria marak terjadi di hampir seluruh wilayah. Mulai dari mereka yang tergantikan sagunya dengan sawit di Papua, yang terhimpit tambang liar di Bone, Sinai dan Gowa, konflik tanah di Langkat, warga adat yang mempertahankan konservasi di Telok Bena, sampai pada masyarakat yang tergusur di Ibukota. Selain itu ditambah lagi warga yang mempertahankan ruang hidupnya dari proyek pembangunan bandara di Majalengka dan Kulon Progo, warga yang bertahan di bawah ancaman proyek tambang di Lumajang, Sumatra Utara, Karawang, Jami dan Bangka, yang berusaha bertahan di wilayah perkebunan di Indramayu dan Moromoro, serta warga yang mengalami konflik agraria di Rembang, Jawa Tengah.

Dampak pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang menyebabkan timbulnya konflik sosial vertikal maupun konflik sosial horizontal yang tidak berkesudahan. Konflik vertikal adalah konflik antara warga dan pemerintah serta korporasi, sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga itu sendiri. Konflik antar warga dapat terpetakan melalui warga pro pendirian pabrik semen dan warga kontra pendirian pabrik semen. Oleh karena itu, menariknya, warga konflik di Tegaldowo secara signifikan bertransformasi

memiliki kesadaran politis yang secara alamiah disebabkan atas terancamnya ruang hidup mereka dari pertambangan semen. Walaupun pada mulanya, kesadaran tersebut datang secara internal untuk merespon masalah yang timbul dalam ruang hidup sosial-ekonomi warga. namun, ada pula faktor eksternal yang mendukung adanya proses internalisasi tersebut. Tentunya berupa gagasan maupun metode perjuangan yang diberikan oleh para aktivis sosial maupun para akademisi.

Kesenjangan perdamaian bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salahsatunya adalah lemahnya pencapaian perdamaian (*peace making*) atau kesepakatan damai (*peace accord/ agreement*) yang dicapai. Faktor lainnya adalah lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian berlangsung di masyarakat. Selain itu kesenjangan perdamaian juga bersumber dari beratnya dampak atau beban masalah yang dihadapi (Tri Ardianto, 2015). Lemahnya proses perdamaian diatas karena tidak adanya pemufakatan dari negosiasi yang dilakukan antar kedua pihak. Bahkan, setelah negosiasi yang berulang-ulang dilakukan mengalami kegagalan karena masyarakat tetap konsisten dengan keyakinanya mempertahankan lingkungan hidup agraris dan menolak industrialisasi. Pemerintah justru menggunakan cara-cara yang destruktif: mengadudomba warga sehingga tercipta konflik horizontal, juga menggunakan peran militer untuk merepresi dan mengintimidasi warga sehingga dapat menciptakan ketakutan dan melemahkan gerakan sosial penolakan pendirian pabrik semen yang mereka lakukan.

Warga penolak pendirian pabrik semen di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gundem, Rembang, Jawa Tengah, telah melakukan beragam upaya untuk menolak pembangunan pabrik semen di kampungnya: mulai dengan menempuh jalur hukum, audiensi, sampai pada pengorganisiran massa aksi. Upaya penuntasan sengketa dengan menempuh jalur hukum telah beberapa kali ditempuh warga. Dari pengajuan PK atas SK Gubernur Jawa Tengah di PTUN Semarang, putusan banding PTUN Surabaya hingga penuntutan ke MA, membuat kajian-kajian strategis terkait lingkungan hidup yang kemudian menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, penggalangan petisi solidaritas hingga audiensi yang bersifat konstruktif.

Aksi-aksi penolakan pun beberapa kali warga selenggarakan, mulai dari aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, *long-march* dari Rembang menuju Semarang, aksi

semen kaki di depan istana kepresidenan, pemasangan spanduk-spanduk bertuliskan penolakan pabrik semen, hingga pada pemblokiran jalan untuk menghalang masuknya kendaraan-kendaraan besar pembawa alat berat dan meteril bangunan ke dalam proyek. Sayangnya, aksi-aksi tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad pemerintah untuk menghentikan mega-proyek pabrik semen. Ironisnya lagi, pada saat pelaksanaan aksi semen kaki jilid dua di depan istana awal tahun 2017, salah satu petani, Bu Patmi, yang disebut-sebut sebagai kartini kendeng, gugur dalam perjuangannya menyuarakan penolakan pabrik semen. Meninggalnya Bu Patmi dalam aksi tersebut tidak juga mengetuk nurani pemerintah untuk menghentikan proyek.

Penolakan warga tersebut dikarenakan lokasi pabrik dan lokasi eksploitasi penambangnya di wilayah Cekung Air Tanah (CAT) Watuputih. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpanan cadangan air. Hasil penelitian air bawah tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam *karst*.

Penolakan warga terhadap pendirian pabrik semen disebabkan karena tidak adanya keterbukaan dalam hal pengaksesan informasi dan regulasi pendirian pabrik semen. Selanjutnya, terjadinya pelanggaran-pelanggaran dengan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip FPIC secara utuh. FPIC adalah ijin sosial untuk bertindak. Menurut Marcus dan Fergus (2004) FPIC merupakan strategi yang dapat digunakan bagi seorang atau sekelompok orang yang potensial terkena dampak dari pembangunan. Dengan konsep ini, orang atau sekelompok orang yang terdampak dapat memiliki hak veto untuk menggagalkan proyek apapun yang ada di wilayah mereka. Kekuatan veto inilah yang juga menjadi penyeimbang untuk melakukan negosiasi dengan posisi setara bersama pengajur proyek.

Hingga kini penolakan yang konsisten tetap dilakukan oleh warga Tegaldowo. Pun bermunculan pula dukungan solidaritas dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, periset dan aktor-aktor lainnya. bahkan, suara penolakan bermunculan dari kalangan seniman yang menggelar panggung-panggung solidaritas di berbagai kota di Indonesia, aksi-aksi mahasiswa yang mengkampanyekan

penolakan pabrik semen di kota-kota, sampai pada penggalangan dana donasi sebagai benefit pemberdayaan pengorganisasian warga Rembang yang sedang berkonflik.

Penulis mengambil sebuah koersi sederhana yang berkorelasi dalam ruang konflik Rembang terhadap pola perubahan pemikiran politik warga. Apa yang mempengaruhi munculnya kesadaran politis mereka yang secara sadar mengorganisir dirinya masuk ke dalam wilayah perlawanan menolak pendirian pabrik semen. Apakah hal tersebut memiliki irisan dengan aktivisme politis mahasiswa yang masuk mendampingi mereka menolak pabrik semen. Atau, apakah aktivisme gerakan para aktivis kerakyatan masuk terlibat mengadvokasi mereka dalam penyelesaian konflik dan memberikan pendidikan politik terkait strategi dan siasat penyelesaian konflik. Atau, apakah para akademisi dan periset lingkungan turut memberikan pemahaman berwawasan ekologi yang menstimulasi wawasan warga untuk senantiasa menjaga rasionalitas ekologi dari bentuk-bentuk irasionalitas. Penulis berhipotesis bahwa dukungan diatas benar adanya. Sehingga membantu masyarakat untuk keluar dari kebiasaan bertradisi yang konservatif, dan tanpa tendeng alin-aling menghendaki adanya perubahan mendasar struktur masyarakat menjadi struktur partisipan atas budaya politik yang selama ini mereka anut. Penulis mendiskusikan hasil peninjauan langsung di lapangan dengan menggunakan teori tipe budaya politik dan teori perubahan sosial terhadap perubahan kesadaran politik warga Desa Tegaldowo, Remabang, yang sedang mengalami konflik dengan legitimasi peraturan negara dan PT.Semen Indonesia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **B.1. Konflik**

Menurut Johnson (dalam Arif Samsul, 2014) konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik lebih mudah terjadi diantara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Dari definisi diatas, penulis menyepakati bahwa situasi menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain terjadi dalam kasus di Tegaldowo. warga selalu berupaya mengagalkan

proyek pabrik semen jauh sebelum proses konstruksi bangunan dilakukan. Sayangnya, warga selalu kalah karena berhadapan dengan kekuasaan yang terlegitimasi.

## **B.2. Budaya Politik**

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Kemudian, Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai, adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond (dalam Milana Robby, 2010) mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

- a. Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
- b. Budaya politik kaula (*subject political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- c. Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

## **B.3. PERUBAHAN SOSIAL**

Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Artinya, meskipun para Sosiolog memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, artinya di dalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Menurut Selo Soemartjan (dalam Djazifah Nur, 2014), Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya,

termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Oleh karena itu, warga statis dapat berubah menjadi dinamis dikarenakan terjadinya konflik yang merubah kesadaran sosiologis warga menjadi kesadaran yang kecenderungannya memiliki progresifitas perubahan. Hal tersebut menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi perubahan sistem sosial masyarakat dalam hal mereduksi nilai-nilai politis dan pola perilaku militan dalam merespon pendirian pabrik semen, baik secara individualis maupun secara kolektif dari asosiasi bebas masyarakat itu sendiri.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisa dan menyajikan data hasil wawancara bersama sumber primer sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Adapun penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu berupa pengelompokan suatu gejala, fakta dan masalah tertentu (Arikunto, 2002). Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya akan menggambarkan apa adanya suatu gejala atau keadaan (Arikunto, 2002). Dengan demikian, fenomena yang hendak didiskusikan dalam penelitian ini adalah realitas konflik beserta dampak-dampaknya atas perubahan kesadaran politik pada warga Tegaldowo dalam menghadapi sengketa pendirian Pabrik Semen Indonesia.

Unit analisis pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti pada objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi tiga komponen menurut Spradly (Herdiansyah Haris, 2012) yaitu :

- (1) *place*, tempat dimana interaksi dalam penelitian berlangsung;
- (2) *actor*, pelaku atau orang yang sesuai dengan objek penelitian tersebut;
- (3) *activity*, kegiatan yang dilakukan aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan tujuan agar mendapatkan data-data valid dalam penelitian. Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- (1) Observasi: Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Penulis mengamati pola perubahan pemikiran politik masyarakat konflik di Desa Tegaldowo, serta aktifitas yang mereka lakukan untuk menolak pabrik semen. Hasil pengamatan digunakan penulis sebagai informasi tambahan dalam penelitian.
- (2) Wawancara: Menurut Moleong (dalam Herdiansyah Haris, 2012), wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkenaan dengan persoalan konflik yang sedang mereka hadapi. Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

## **D. PEMBAHASAN**

### **D.1. Konflik Mentransformasi Budaya Politik Warga Tegaldowo Dari Parokial Menjadi Partisipan**

Budaya politik warga pedesaan di Tegaldowo, kecenderungan awalnya memiliki tingkat kepercayaan politik parokial. Budaya politik parokial adalah tipe budaya politik paling rendah warga negara. Jika diartikulasi, parokial memiliki kealpaan terhadap terjadinya perubahan sistem politik secara komperhensif. Kemudian, parokial tidak memiliki harapan apapun terhadap sistem politik. Dimana mereka lebih tertarik mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas, mereka sama sekali tidak perhatian terhadap segala hal yang sedang terjadi dalam sistem politik, bahkan pengetahuan mereka sangat sedikit sekali tentang politik dan jarang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Tetapi terdapat warga penganut varian lain dari parokial, yaitu subyek-parokial. Subyek-parokial adalah budaya politik masyarakat yang memiliki sedikit sekali pemahaman tentang politik.

Sumarno adalah seorang warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gundem, Rembang yang terletak begitu dekat dengan lokasi pendirian pabrik Semen Indonesia. Sumarno adalah warga setempat yang berprofesi sebagai petani dan terlibat langsung dalam perjuangan menolak pabrik semen di kampungnya. Pun ia berasumsi bahwa standarisasi kesejahteraan warga kota berbeda dengan warga desa, warga kota berorientasi pada materi fisik dan

tingkat konsumerisme yang berlebihan, sedangkan warga desa hanya berorientasi pada kecukupan pangan sehingga tidak membutuhkan semen. Sumarno meyakini:

“Jawa ini kan sudah penuh ya, orangnya bertambah, lahanya selalu berkurang. Selain itu, Kendeng ini sebagai lumbung pangan dan juga sebagai penyimpanan air untuk wilayah pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora). Karena karst yang ada disini itu kan untuk penyerapan air, jadi wilayah-wilayah disini sumber airnya ya dari pegunungan Kendeng. Dan Kami punya banyak alasan, salah satunya adalah pertanian, kami sudah menghitung dengan jelas ketika ada pabrik semen sebenarnya warga akan dirugikan”

Oleh karena itu, budaya politik tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Penulis berasumsi bahwa adanya fenomena tersebut dikarenakan tingkat pendidikan warga yang relatif rendah, sehingga mereka tidak mampu mengakses sumber daya politik untuk ikut berperan aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Belum lagi, ditambah *political cost* Indonesia yang mahal, sehingga membuat warga lebih tidak tertarik lagi dengan perpolitikan.

Dengan adanya bentuk konflik vertikal pendirian pabrik semen, warga mengalami transformasi kesadaran politik yang koheren dengan budaya politik tipe partisipan, walaupun tidak mengambil peran sebagai praktisi. Keterancaman atas terampasnya ruang hidup dan lingkungan mereka, menjadi faktor utama perubahan pola pemikiran yang paling rasional untuk mengambil sikap lebih politis karena harus berbenturan dengan instrumen-instrumen kenegaraan. Sumarno menegaskan bahwa cara-cara strategis menempuh jalur hukum telah berulang-ulang warga lakukan:

“Kalau warga sendiri sudah taat hukum, karena ketika ada sengketa, pemerintah menyediakan tempat, yaitu jalur hukum untuk penyelesaian, kami selalu menempuh wilayah itu. selain itu, kami juga menggelar aksi-aksi damai. kemarin dari putusan MA kita menang, terus dari KLHS kita juga menang, bukan menang berarti kita langsung senang, tapi rekomendasinya harus jelas, bahwa disini tidak ada tambang. Terus gubernur mengatakan bahwa semen harus menaati aturan ini, ternyata sekarang yang terjadi di lapangan semen masih membangun jalan menuju pertambangan, dan rencananya akan mengambil bahan baku dari tambang yang sudah ada di Rembang. warga pun bingung sebenarnya harus taat pada siapa lagi. Tapi yang jelas, semua hal sebenarnya kami menang”

Oleh karena itu, pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik,

kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner (dalam Milana Robby, 2010), terdapat empat penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

- (1) Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- (2) Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- (3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi.
- (4) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Modernisasi, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan aktivitas pemerintah yang dianggap menindas, menjadi gerbong keberangkatan warga untuk merespon dan melawan. Tentunya, bukan tanpa kenihilan logika, justru mereka membawa kesadaran logis yang menjadi rasionalisasi untuk memetakan konflik yang sedang mereka hadapi. Sumarno lantas menimpali:

“Kalau kami melihat kekuatan modal disini sangat luar biasa dan kami beranggapan bahwa ini adalah kepentingan kelompok saja. Kalau BUMN murni tidak seperti ini caranya, dan memang kami kebingungan juga ketika ada jagung, ada padi, Kok malah semen yang diprioritaskan. Semen ini kan kebutuhannya untuk ekspor, kenapa pemerintah lebih mementingkan semen untuk ekspor, padahal pemerintah dengan

program Nawacita harusnya kami di dukung di wilayah pertanian. Kami melihat pemodal ini sudah luar biasa di Indonesia dan kami merasa Indonesia bukan untuk wilayah industrialis, tapi untuk agraris dan maritim”

Alan R. Ball (dalam Milana Robby, 2010) menyatakan bahwa budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Pernyataan Alan diatas penulis anggap mampu mengafirmasi perubahan yang terjadi pada warga Tegaldowo yang sedang berkonflik. Sedangkan Kevin R.Hardwick (dalam Milana Robby, 2010) menyatakan bahwa partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka. Seperti, interaksi antara warga negara dengan pemerintah serta usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan konsep perspektif diatas, proses perubahan budaya politik warga Tegaldowo melakukan pengakomodasian sikap politiknya melalui penolakan pendirian dan oprasionalisasi pabrik Semen Indonesia, perubahan tersebut jerjadi dengan merubah struktur-fungsional warga, tentunya, warga tidak hanya berfungsi sebagai partisipan politik dalam hal ikut aktif mengimplementasikan atau ikut membangun formulasi kebijakan pemerintah. Namun, secara kritis mampu mengevaluasi kebijakan pemerintah melalui lembaga-lembaga hukum. Selain itu juga, perubahan tipe budaya politik warga dari parokial menjadi partisipan tidak terlepas dari bagaimana sikap mereka dalam merespon kapitalisme global, kendati sadara bahwa sistem tersebut merupakan ancaman yang dapat menggeser posisi mereka sebagai petani. Sebab warga memiliki ketakutan terhadap lahan produktif pertanian yang kapan saja bisa berubah menjadi industri besar.

## **D.2. Perubahan Sosiologis Warga Dalam Menghadapi Konflik**

Konflik sosial tidak selalu berakhir dengan perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena konflik sosial berlangsung secara terus

menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya. Menurut Karl Marx (dalam Arif Samsul,2014), konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Sumarno menyatakan:

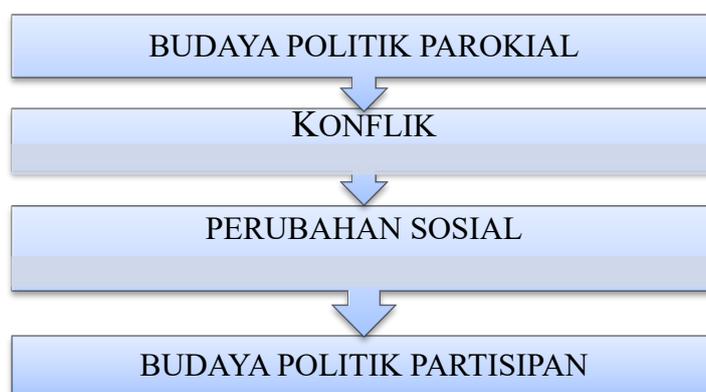
“Di lihat dari putusan dan rekomendasi KLHS kan jelas, disini CAT. CAT tidak untuk pertambangan, sebenarnya ketika itu dikeluarkan dan di setuju oleh menteri juga di ketahui oleh presiden, harusnya gubernur mengikuti itu, tapi memang kelihatannya pemerintah daerah tetap melakukan berbagai macam cara supaya tetap ada pertambangan disini. Kami tetap akan mengawal terus, mengingatkan kepada pemerintah, bahwa pemerintah ini salah, putusnya sudah ada kok masih melanggar”

Suatu penyebab seringkali diartikan sebagai suatu fenomena yang diperlukan dan cukup mampu untuk menimbulkan akibat yang bisa diprakirakan. Diperlukan, mengandung pengertian bahwa kita tidak akan pernah menemukan suatu akibat tanpa adanya penyebab, dan cukup mampu mengandung pengertian bahwa gejala itu sendiri selalu menimbulkan akibat/sebagai sumber akibat ( Paul B Horton dan CL Hunt, 1992 ).

Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa faktor penyebab perubahan sosial warga di Desa Tegaldowo menjadi politis diakibatkan oleh adanya konflik vertikal antar kelas tertindas dan kelas penguasa. Warga dalam hal ini merasa ruang hidupnya terancam karena pendirian pabrik semen yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki otoritas mutlak untuk tetap membangun pabrik semen di Rembang guna pertumbuhan ekonomi. Kontradiksi tersebut yang kemudian berakhir menjadi konflik, terlepas dari apapun bentuk penolakan dan tuntutan warga serta dampak-dampak kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan pasca produksi. Saat penulis menanyakan perkembangan, Sumarno menjawab:

“Kalau sekarang mereka masih membangun jalan conveyer menuju tambang. kemarin dari putusan MA kita menang, terus dari KLHS kita juga menang, bukan menang berarti kita langsung senang, tapi rekomendasinya harus jelas, bahwa disini tidak ada tambang. Terus gubernur mengatakan bahwa semen harus menaati aturan ini, ternyata sekarang yang terjadi di lapangan semen masih membangun jalan menuju pertambangan, dan rencananya akan mengambil bahan baku dari tambang yang sudah ada di Rembang. warga pun bingung sebenarnya harus taat pada siapa lagi. Tapi yang jelas, semua hal sebenarnya kami menang”

Pitirim Sorokin (1889-1968) seorang ahli sosiologi Rusia berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir, yang meliputi : (a) kebudayaan ideasional (*ideational cultural*) yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati (super natural ); (b) kebudayaan idealistis (*idealistic culture*) di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal; dan (c) kebudayaan sensasi (*sensate culture*) di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, ada sejumlah hal yang menarik untuk diamati tentang warga Tegaldowo. Pertama, secara kebudayaan dan kebiasaan bertradisi, mayoritas warga di Tegaldowo berprofesi sebagai petani, warga meyakini bahwa industri akan merubah corak kebudayaan bertradisi mereka sebagai seorang petani yang hanya berorientasi pada kecukupan pangan. Kedua, warga dengan penuh kesadaran menolak pendirian pabrik semen dikarenakan pabrik semen akan menimbulkan dampak ekologi negatif, persis seperti kajian para ilmuwan dan rekomendasi KLHS (kajian lingkungan hidup srategis). Ketiga, implementasi peraturan dan administrasi oleh pemerintah daerah dalam upayanya mendirikan pabrik semen berhasil menstimulasi warga untuk mempelajari peraturan dan ilmu-ilmu administrasi.



Maraknya konflik agraria di Indonesia membuat para petani Tegaldowo berpersepsi bahwa Rembang tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik lainnya. Tentunya, pendirian pabrik semen beririsan dengan alih fungsi pertanian produktif di daerah-daerah lainya. Sumarno menyatakan:

“Kendeng ini tidak bisa di pisahkan dari dampak agraria yang akan terjadi wilayah lain, karena Rembang ini salah satu kunci dari wilayah-wilayah lainnya, di Rembang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pabrik, tapi tetap saja diloloskan oleh pemerintah. Nah, ini kalau sampai terjadi memang dampaknya akan berpengaruh ke wilayah lain. Jadi ketika pemerintah mengatakan ada orang ikut aksi tolak semen: “itu orang mana, orang rembang atau tidak, apakah sudah pernah ke Rembang atau belum”, gubernur biasanya seperti itu. ini masalah lingkungan dan tidak bisa di kelompok-kelopokan seperti itu. dan perlu diingat bahwa pertama kali yang menyuruh untuk disengketakan di PTUN adalah Pak Ganjar, dia bilang sendiri, kalau nanti semen kalah harus mengikuti, tapi kenyataannya dia tidak taat sendiri....Kami akan mengawal terus apa yang sudah dilakukan pabrik semen, dan kami akan selalu menolak karena dasar kami jelas. Supaya Jawa Tengah tetap ijo royo-royo seperti yang dikatakan Pak Ganjar”

Dari konsepsi diatas, penulis berasumsi bahwa konflik menghadirkan sebuah fenomena yang sarat akan nilai starategis dalam menciptakan pola berpikir hingga pola sosial warga yang mengalami kesadaran kritis. Dan secara alamiah mengalami perubahan budaya politik dari parokial menjadi partisipan, sehingga turut mempengaruhi perubahan sosial warga Tegaldowo baik secara internal maupun eksternal.

## **E. KESIMPULAN**

Penemuan atas hasil peninjauan di lapangan berhasil menyadarkan penulis tentang budaya politik partisipan warga Tegaldowo dalam perjuangannya menolak pendirian pabrik semen. Militansi warga teruji dengan seberapa jauh mereka mempertahankan konsistensi atas konflik yang menerpa ruang hidupnya sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. Kesungguhan tersebut menjadi tolak ukur bahwasanya warga apatis atau statis dapat mengalami proses perubahan aktif dan dinamis yang signifikan disebabkan oleh adanya pemicu berupa konflik. Kendati sadar bahwa mereka tidak menginginkan adanya industrialisasi yang berupaya menggeser posisi masyarakat agraris. Warga secara maksimal menjaga supaya tidak terjadi pergeseran nilai-nilai agraris yang telah menjadi budaya dalam ruang hidup mereka.

Ada beberapa temuan menarik yang sarat akan perubahan budaya politik warga Tegaldowo: pertama, soliditas dan solidaritas yang terbangun bersifat alamiah, artinya, waraga memiliki keresahan dan permasalahan yang sama. dengan demikian berhasil menyatukan kekuatan untuk bersama-sama memperjuangkan lingkungan mereka dari

eksploitasi tambang semen. Warga juga menyadari bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan dengan tidak berkelompok, maka dari itu, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil hingga besar dengan pengorganisasian massa yang rapi: berjuang melalui lembaga-lembaga kenegaraan hingga turun ke jalan untuk mengkampanyekan persoalan yang terjadi di desa mereka.

Kedua, kemampuan retorika warga dalam orasi-orasi ekonomi-politik yang tersuarakan pada aksi-aksi, hal tersebut memberikan informasi kepada penulis bahwa budaya kritis masyarakat tidak hanya dapat terasah melalui bangkus-bangku sekolah atau universitas saja. Namun, segala ruang dapat menjadi patron pengasah tingkat intelektualitas seseorang, termasuk dalam ruang-ruang konflik. Sebab kekayaan intelektual senantiasa menjadi kebutuhan utama dalam fungsinya sebagai alat perjuangan warga konflik.

Ketiga, konsepsi-konsepsi perjuangan yang mereka rumuskan adalah bentuk-bentuk strategi yang ideal, penulis menemukan temuan penting dalam organisasi warga penolak tambang semen yang ternyata tidak memiliki seorang pemimpin tunggal. Warga bergerak secara sporadis dan dengan sukarela membentuk organisasi yang non-struktural dan non-hirarkis. kemudian, dalam hal pengambilan keputusan, warga menggunakan metode konsensus yang egaliter. Artinya, warga memiliki kesetaraan dan bobot yang sama dalam hal pengambilan keputusan.

Keempat, warga menggunakan media sosial sebagai media tandingan atas media-media populer yang berkepihakan dan tidak netral. Media-media tersebut dikelola secara mandiri dan kolektif untuk mengabarkan realitas yang terjadi dalam ruang konflik yang mereka hadapi. Selain itu, media-media warga dipergunakan sebagai alat untuk membangun relasi sosial dengan orang-orang yang jauh di luar Rembang bahkan relasi sosial internasional. Media tersebut menjadi perhatian utama karena dianggap mampu memberikan kesadaran politik maupun kesadaran lingkungan untuk masyarakat-masyarakat di luar Rembang. Tentunya, untuk mepersuasi masyarakat daerah lain sehingga senantiasa mempertahankan ruang hidupnya dari keserakahan pembangunan dan kekuatan modal.

Kelima, warga melakukan advokasi dan pengkajian ilmiah yang berkorelasi dengan persoalan yang mereka hadapi. Tentunya upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menggugat perizinan pendirian pabrik semen. Advokasi-advokasi tersebut dilakukan dengan beragam

cara, mulai dari pengadvokasian yang dilakukan dalam tataran eksekutif, legislatif sampai yudikatif. Tentunya warga aktif merekomendasikan hasil kajian-kajian ilmiah kepada pemerintah sebagai bentuk tandingan atas kajian yang berkepihakan pada korporasi pendiri pabrik semen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Data Primer Purposive Sampling*. Jakarta, Bineka Cipta.
- Dwicipta dan Hendra Tri Ardianto. (2015). *Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta. Litrase Press.
- Haris, Herdiansyah. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, 2012, Bandung, PT. Remaja Roddakarya.
- Colchester, Marcus dan Fergus Mackay. (2004). *In Search of Middle Ground: Indigeneous People, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*. FPP.
- Nur, Djazifah Nur. (2014) Proses Perubahan Sosial di Masyarakat, 1 Mei. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra/nur/djazifah-er-msi/ppm-modul-sosiologi-perubahan-sosial.pdf>
- Robby, Milana. (2010). Perubahan Masyarakat Politik, 7 Desember 2010. [http://documentstore.weebly.com/uploads/4/2/2/7/4227221/budaya\\_politik.pdf](http://documentstore.weebly.com/uploads/4/2/2/7/4227221/budaya_politik.pdf)
- Samsul. (2014). Karakteristik Perubahan Sosial, 7 Oktober 2014. <http://digilib.unila.ac.id/3544/17/BAB%2011.pdf>